

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN KEMENTERIAN USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TAHUN 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pengukuran indeks kualitas kebijakan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);

3. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TAHUN 2025.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Tim Pengukuran indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim IKK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Kementerian ini.
- KEDUA : Tim IKK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pengarah;
 - b. Koordinator Instansi;
 - c. Wakil Koordinator; dan
 - d. Analisis Instansi.
- KETIGA : Tugas Tim IKK sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA:
- a. Pengarah bertugas memberikan arahan terkait dengan analisis kebijakan;
 - b. Koordinator Instansi bertugas:
 1. menjadi penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional;
 2. mendistribusikan program kerja yang akan menjadi penilaian mandiri (*self-assessment*) yang akan dilakukan oleh Analisis Instansi;
 3. melakukan pengecekan terhadap penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung yang dilakukan Oleh Analisis Instansi;
 4. mengirim hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) ke koordinator nasional;
 5. mengelola akun Indeks Kualitas Kebijakan; dan
 6. menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada Koordinator Nasional.
 - c. Wakil Koordinator Instansi bertugas:
 1. membantu tugas Koordinator Instansi; dan
 2. bertanggung jawab kepada Koordinator Instansi.
 - d. Analisis Instansi bertugas melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Sekretaris Kementerian ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Kementerian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juli 2025

SEKRETARIS
KEMENTERIAN,



ARIF RAHMAN HAKIM
NIP. 19660312 199203 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
NOMOR 216 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS
KEBIJAKAN KEMENTERIAN USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN TAHUN 2025
KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	Reza Fikri Febriansyah NIP. 198302282006041001	Kepala Biro Organisasi, SDMA dan Hukum	Biro Organisasi, SDM Aparatur dan Hukum	Pengarah
2	Istiani Erawati NIP.198402102011012011	Plt. Kepala Bagian Hukum	Biro Organisasi, SDM Aparatur, dan Hukum	Koordinator Instansi
3	Dina Dewi Kristiani NIP. 198403022011012013	Kepala Bagian Organisasi dan RB	Biro Organisasi, SDM Aparatur, dan Hukum	Wakil Koordinator Instansi
4	M. Irsan Ali NIP. 198206102011011006	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Wakil Koordinator Instansi
5	Baihaki NIP. 197408012008111002	Kepala Bidang Rantai Pasok Usaha Mikro	Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro	Wakil Koordinator Instansi
6	Amrih Wigiati NIP. 196601261991032001	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Kecil	Analisis Instansi
7	Yonas Dian Hermanu NIP. 198306272009121001	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Sekretariat Deputi Bidang Kewirausahaan	Analisis Instansi
8	Ferdy Irwanda NIP. 197609162009101001	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Sekretariat Deputi Bidang Usaha Menengah	Analisis Instansi
9	Ika Wahyu Setyawati NIP. 199102132014032002	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Asisten Deputi Produksi dan Digitalisasi Usaha Kecil	Analisis Instansi
10	Mahendra Purnama yahya NIP. 199005182014031002	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat Deputi Bidang Usaha Menengah	Analisis Instansi

11. Tutut ...

11	Tutut Dwi Laksanawati NIP. 199101152014032005	pengembang kewirausahaan ahli muda	Asisten Deputi Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro	Analisis Instansi
12	Syahrhan Firdaus NIP. 199406202020121014	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Analisis Instansi
13	M. Deni Yoga Iswara NIP. 199801312025061010	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Biro Organisasi, SDMA dan Hukum	Analisis Instansi
14	Anselmus Jefri Aldonny Pasaribu NIP. 199904202025061008	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Biro Organisasi, SDMA dan Hukum	Analisis Instansi
15	Gaya Safitrie NIP. 199602162024212012	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Biro Organisasi, SDMA dan Hukum	Analisis Instansi

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ARIF RAHMAN HAKIM

NIP. 19660312 199203 1 001

Tembusan Yth.

1. Menteri;
2. Wakil Menteri;
3. Yang bersangkutan